ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Prodi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Disusun Oleh :

ISTINGANATUL MUKAROHMAH

12.1.02.01.0160

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UN PGRI KEDIRI
2016

Skripsi oleh :

ISTINGANATUL MUKAROHMAH

NPM: 12.1.02.01.0160

Judul

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek)

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

Pada tanggal: 20 Juli 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. M. Anas, M.M, M.Si	Suhardi, S.E., M.Pd
NIDN: 0028106601	NIDN:0701105804

ii

Skripsi oleh:

ISTINGANATUL MUKAROHMAH

NPM: 12.1.02.01.0160

Judul:

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek)

Telah Dipertahankan didepan Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

Pada tanggal: 05 Agustus 2016

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji : TTD

1. Ketua : Dr. H. M. Anas, S.E., M.M., M.Si
2. Penguji I : Dra. Puji Astuti, M.M, M.Si., Ak
3. Penguji II : Suhardi, S.E., M.Pd

Mengetahui,
Dekan FE

Dr. Subagyo, M.M
NIDN: 0717066601

iii

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek)

ISTINGANATUL MUKAROHMAH
12.1.02.01.0160
Fakultas Ekonomi – Akuntansi
Istingatulmukarohmah@gmail.com
Dr. H. M. Anas, M.M, M.Si dan Suhardi, S.E., M.Pd
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Abstrak

Istinganatul Mukarohmah : Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek), Skripsi, AKUNTANSI, FE UN PGRI Kediri, 2016.

Kata kunci: kesiapan, komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamat dan pengalaman untuk mengetahui kesiapan Pemda Kabupaten Trenggalek yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi; untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dekriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek. Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data menggunakan analisi dekriptif.

Berdasarkan analisis data sebelumnya maka kesiapan Pemda Kabupaten Trenggalek yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dilihat dari parameter kriteria kesiapan integritas kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori belum siap.

Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, kurangnya Bintek atau pelatihan, kurangnya sosialisasi berkala, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi, selain itu lemahnya sistem aplikasi yang digunakan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti ingin melakukan penelitian tentang **"ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Study Kasus pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek) "**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan sebelumnya,maka fokus penelitian dari penelitian ini dapat ini secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang diindikasikan dengan Komitmen, SDM, Sarana Prasarana Dan Sistem Informasi?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan sebelumnya,maka tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut (a) Untuk mendeskripsikan Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang diindikasikan dengan Komitmen, SDM, Sarana Prasarana, & Sitem Informasi. (b) Untuk mendeskripsikan kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam akuntansi serta dapat memberikan bukti empiris mengenai Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek).
   b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian dan merupakan wujud dari aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
   c. Bagi Akademis hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai analisa kesiapan sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menerapkan SAP berbasis akrual.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukkan terhadap pemerintahan yang menerapkan SAP berbasis akrual.
   b. Bagi SKPD Kabupaten Trenggalek, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan

masukan dalam menerapkan perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan.

METODE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan alasan karena pada penelitian ini peneliti ingin mengukur sekaligus mendeskripsikan kesiapan pemerintah daerah yang dapat dikategorikan dalam berbagai golongan. Penelitian dekriptif kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Di satu sisi kajian ini berupaya mendeskripsikan suatu fenomena secara apa adanya dari prespektif pelakunya, sedang dari sisi pendeskripsian itu dilakukan dengan bantuan alat-alat analisis kuantitatif. Dengan demikian diharapkan analisis tentang kesiapan Pemerintah daerah dalam implementasi SAP, kendala-kendala yang dihadapi di pemerintah daerah dapat dideskripsikan secara jelas untuk kemudian dianalisis dan diinterprestasikan untuk menarik suatu kesimpulan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data karena pada penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, dimana peneliti langsung melakukan penelitian dalam pengumpulan data. Selain itu kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

C. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu SKPD Kabupaten Trenggalek yang berada di provinsi Jawa Timur.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian mulai dari awal penelitian sampai menghasilkan temuan yaitu sebagi berikut :

1. Tahap awal penelitian, peneliti mengirimkan surat izin penelitian kepada kantor KESBANG, yang selanjutnya surat tersebut diturunkan kekantor dan SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Trenggalek.
2. Setelah surat penelitian sudah sampai di setiap SKPD yang akan dijadikan tempat penelitian barulah

peneliti melakukan penelitian dengan melakukan penyebaran kuesioner pada setiap SKPD.

3. Selanjutnya peneliti menarik semua kuesioner yang telah dibagikan.
4. Setelah kuesioner terkumpul selanjutnya peneliti melakukan perhitungan yang nantinya jawaban dari setiap indikatornya untuk mengukur kesiapan pemerintah.
5. Tahapan akhir yaitu, setelah hasil pengukuran dengan skala likert sudah diperoleh maka tindakan akhir peneliti adalah mendeskripsikan hasil dari uji validitas maupun reliabilitas.

E. Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Adapun data primer yang diperlukan yaitu data hasil wawancara dan hasil jawaban dari kuesioner yang disebar menurut (Sugiyono: 2012)
2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Adapun data sekunder yang diperlukan yaitu data daftar nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Trenggalek menurut (Sugiyono: 2012)

F. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari buku-buku selain itu dari peraturan-peraturan baik dari peraturan Kemendagri maupun peraturan Pemerintah Kabupaten Trenggalek itu sendiri menurut (Sugiyono: 2014).
2. Studi lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan Teknik pengambilan data dengan observasi yaitu mengadakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti, selain itu dengan menggunakan kuesioner dan wawancara menurut (Sugiyono: 2014)

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu Deskriftif Kualitatif Penelitian deskriptif Maka dari itu digunakan pengukuran Skala Likert yaitu Pengukuran yang memungkinkan responden untuk merangking seberapa kuat mereka siap atau tidak siap terhadap pernyataan-pernyataan tertentu. Skala ini mempunyai jarak dari sangat positif ke sangat negatif terhadap obyek sikap tertentu. Skala likert juga diartikan sebagai cara pengukuran dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban. Skala yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian kemendagri (2012) dimana skala pengukuran kuisioner menggunakan skala:

1 = Sangat Tidak Siap
2 = Tidak Siap
3 = Cukup Siap
4 = Siap
5 = Sangat Siap

H. Pengecekan Keabsahaan Temuan

Uji keabsahan temuan dalam Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

   Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa hendak kita ukur. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table. Data dinyatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item Total Correlation lebih besar dari r-tabel pada signifikansi 0.05 (5%). Untuk mempercepat uji validitas dihitung dengan program SPSS. Uji signifikansi validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Bagi butir pertanyaan yang tidak valid maka akan dikeluarkan dari daftar pertanyaan dan tidak digunakan pada analisis selanjutnya (Ghozali, 2013:52).

2. Uji Reliabilitas.

   Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau kostruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat dikatakan menunjukkan kekonsistenan dari suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Makin kecil kesalahan pengukuran makin reliabel alat pengukur begitu pula sebaliknya. Pengujian keandalan alat pengukuran dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas menggunakan metode alpha (α). Metode alpha yang digunakan adalah metode Cronbanch. Setelah menilai alpha selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka reliabilitas. Instrument yang dipakai dalam variabel diketahui handal apabila memiliki Cronbach alpha 0,70 menurut Ghozali (2013:42)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Trenggalek merupakan sebuah kabupaten diprovinsi jawa timur, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Trenggalek Kota. Kabupaten ini menempati wilayah seluas 1.205,22 km^2 yang dihuni oleh ± 700.000 jiwa. Letaknya dipesisir pantai selatan dan mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Ponorogo; sebelah timur dengan Kabupaten Tulungagung; sebelah selatan dengan patai selatan; dan sebelah barat dengan Kabupaten Pacitan. Dengan terbitnya undang-undang nomer 12 tahun 1950, Trenggalek terbentuk sebagai suatu daerah kabupaten didalam tata administrasi Pemerintah Republik Indonesia.

2. Visi dan Misi

   Visi: terwujudnya kabupaten trenggalek yang maju, adil, sejahtera, berkepribadian, berlandaskan iman dan taqwa.

   Misi:

   a. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten, dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta

pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan.

b. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan.

c. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur transportasi dari skala regional hingga tingkat desa, infrastruktur pertanian, infrastruktur lain, termasuk yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan selatan Trenggalek.

d. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja sektor pertanian dan sektor produktif lain serta meningkatkan daya Tarik investasi industri dengan memperhatian kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kualitatif

Pada Bab sebelumnya, penentuan besarnya sampel menggunakan sejumlah keseluruhan kuisioner (90 buah) yang telah kami sebarkan pada masing-masing unit kerja dan telah mendapatkan balasannya. penyebaran dan tingkat pengembalian dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 90 kuesioner, yang kemudian dari jumlah 40 kuesioner yang disebar, kembali sebanyak 40 kuesioner atau 44,4 %. Berdasarkan 44,4 % kuesioner yang kembali semuanya dianggap memenuhi syarat.

2. Deskripsi Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Diketahui bahwa jenis kelamin pegawai bagian akuntansi sebagian besar adalah wanita, dimana terdapat 30 orang atau 75% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan jenis kelamin pria terdapat 10 orang atau 25% dari jumlah keseluruhan responden. Hal itu menunjukkan bahwa bidang akuntansi pemerintahan kebanyakan di pegang oleh wanita karena ketelitian yang diperlukan dalam bidang ini.

b. Umur Pegawai

Umur Pegawai bagian akuntansi. Sebagian besar responden memiliki umur 25– 35 tahun yakni sebesar 28 orang atau 70%. Hal ini menunjukkan umumnya pegawai bagian akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek merupakan pegawai bagian akuntansi masih golongan muda tetapi sudah mampu dan berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan.

c. Jabatan

Diketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai jabatan sebagai kasubag keuangan , dimana terdapat 26 orang atau 65% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan yang memiliki jabatan sebagai Staff terdapat 12 orang atau 30% dari jumlah keseluruhan responden dan responden yang memiliki jabatan sebagai auditor terdapat 2 orang atau 5% dari keseluruhan responden. Hal itu menunjukkan bahwa pegawai bagian akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sebagian besar yang mengerjakan laporan keuangan benar-benar sesuai dengan jabatannya sehingga mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar.

d. Tingkat Pendidikan

Diketahui bahwa pendidikan pegawai bagian akuntansi sebagian besar adalah sarjana, dimana terdapat 34 orang atau 85% dari jumlah keseluruhan responden. Pendidikan Diploma sebanyak 2 orang atau 5% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan pendidikan SMA sebanyak 4 orang atau 10%. Hal itu menunjukkan bahwa pegawai bagian akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sebagian besar berpendidikan sarjana sehingga memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang baik.

C. Interprestasi dan Pembahasan

1. Hasul Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil perhitungan nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item Total Correlation lebih besar dari r-tabel pada signifikansi 0,05 Sedangkan kriteria valid per indikator menunjukkan nilai lebih besar dari nilai r tabel yaitu >

0,312 (Ghozali, 2013:52). Dengan demikian setiap item pertanyaan dalam kuisioner memiliki konsistensi internal dan dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji Validitas terlihat bahwa semua nilai Cronbach Alpha lebih besar dari angka kritis reliabilitas 0,70, sehingga semua pertanyaan dalam satu variabel dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya (Ghozali, 2013:47)

2. Pembahasan

Penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dengan melihat indikator: komitmen/integritas, SDM, Sarana Prasarana, serta Sistem Informasi adalah Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang didasarkan pada penilaian kesiapan dari masing-masing parameter yang pada umumnya menyatakan cukup siap dan siap tapi apabila merujuk pada teori tentang kriteria kesiapan pemerintah yang diindikasikan dengan kriteria kesiapan komitmen mayoritas pemerintah daerah sudah melakukan perubahan yaitu terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual namun penerapan tersebut belum dilakukan secara keseluruhan oleh setiap SKPD yang ada dipemerintah Kabupaten Trenggalek maka dari itu pemerintah Kabupaten Trenggalek dikategorikan belum siap dari segi komitmen. Begitu juga kriteria kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) pada pemerintah daerah dikategorikan belum siap karena melihat dari analisis jabatan rata-rata SDM yang penyusunan laporan keuagan memiliki jabatan sebagai kasubag keuangan tapi tidak sedikit pula laporan keuangan disusun oleh para staf yang belum begitu kompeten dalam menyajikan laporan keuangan,

begitu pula pada analisis beban kerja masih adanya tumpang tindih terkait dengan pembebanan kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap pegawai, dan dari analisis kompetensi SDM belum bisa dinyatakan kompeten karena masih ada ketidaksesuaian dengan bidangnya karena SDM yang menyajikan laporan keuangan sedikit yang memiliki basic pendidikan akuntansi. Sedangkan pada kriteria kesiapan sarana prasarana pemerintah kabupaten trenggalek dikategorikan cukup siap karena sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung sudah ada sarana prasarana seperti tersedianya perangkat keras komputer dan perangkat lunak pendukung lainya selain itu sudah adanya sarana transportasi yang menunjang operasional disetiap SKPD tetapi sarana prasarana tersebut belum sepenuhnya mencukupi diseluruh SKPD baik dari perangkat keras komputer maupun perangkat lunak pendukung lainya terlebih lagi belum adanya sarana penunjang operasional. Terakhir yaitu kriteria kesiapan sistem informasi pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dikategorikan belum siap karena menilik dari sistem aplikasi yang digunakan pemda masih belum sepenuhnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang valid, akurat, dan sesuai dengan SAP berbasis akrual sekalipun pemda sudah menggunakan sistem aplikasi SIMDA (Sistem Infomasi Manajemen Daerah) hal itu terjadi karena kelemahan aplikasi yang digunakan pemda terkait dengan permasalahan integrasi horizontal antar beberapa sistem yang digunakan yang mengharuskan pemda untuk melakukan input ulang data atau jurnal secara berkala (*batch*). Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek belum cukup siap

dalam menerapan standar akuntansi pemerintah berbasih akrual.

3. Kendala

Hasil yang ada sehubungan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai pedoman umum yang dikeluarkan oleh Kemendagri walaupun penerapan tersebut belum begitu sempurna, karena pemda belum bisa menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara menyeluruh disetiap SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, namun pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk melaksanakan dan memanfaatkan SAP dalam pertanggungjawaban APBD secara menyeluruh sebagai bentuk transparansi tugas menuju good governance.

b. Jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, dikarenakan masih adanya tumpang tindih terkait dengan pembebanan kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari setiap pegawai. Sebaiknya sumberdaya manusia yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan jabatan dan tugas pokoknya masing-masing tanpa adanya pembebanan kerja karena hal itu dapat berpengaruh pada kurang optimalnya hasil laporan keuangan. Selain itu masih sebagian kecil saja yang memahami teknis SAP, dan secara kualitas mungkin masih sangat perlu ditingkatkan karena pada

umumnya pemahaman pegawai mengenai akuntansi pemerintahan masih lemah dan pemahaman tentang penerapan basis akrual masih kurang hal itu dikarenakan masih sedikitnya SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

c. Kurangnya Bintek atau pelatihan terkait penerapan SAP berbasis akrual dari pemerintah pusat untuk bimbingan SAP No. 71 Tahun 2010. Sebaiknya Kemendagri bekerjasama dengan KSAP diharapkan rutin melakukan sosialisasi dan Bintek terkait dengan penerapan basis akrual.
d. Kurangnya sosialisasi secara berkala.
e. Sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi terutama di masing-masing SKPD, seperti perangkat keras computer dan perangkat lunak pendukung untuk menyusun laporan pertanggungjawaban.
f. Pemerintah daerah kurang memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP.

KESIMPULAN

A. Temuan

1. Berdasarkan analisis data sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Kesiapan Pemda Kabupaten trenggalek yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sudah menyatakan cukup siap dan siap dengan adanya dukungan yang dinyatakan dengan adanya perubahan tapi apabila merujuk pada teori tentang kriteria kesiapan pemerintah daerah dikategorikan masih belum siap karena pemda belum bisa berkomitmen untuk penerapan standar akuntansi berbasis akrual secara keseluruhan

disetiap SKPD pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pada kesiapan SDM juga masih adanya pembebanan kerja, dan kurangnya SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, selain itu Sarana Prasarana yang belum mencukupi, dan Sistem Informasi yang digunakan memiliki kelemahan pada sistem aplikasi pemerintah. Adanya kendala tersebut maka pemerintah kabupaten trenggalek dikategorikan belum siap, maka dari itu perlu adanya evaluasi dan pembenahan agar penerapan standart akuntansi pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup karena masih adanya pembebanan kerja sehingga terjadi tumpang tindih dari tugas pokok dan fungsi dari setiap pegawai, kurangnya Bintek atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi selain itu lemahnya sistem aplikasi yang digunakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Kesiapan komitmen, SDM, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi memang bisa dijadikan acuhan parameter untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah kabupaten trenggalek dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Wiyono:2008), “ Kesiapan (readiness) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan, dan itu sesuai dengan perubahan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yaitu terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan berbasis akrual.

2. Implikasi Praktis

Bagi Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten

Trenggalek lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan akrual basis, setelah meninjau faktor-faktor kesiapan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk kendala yang dihadapi sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pertimbangan dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah agar supaya lebih optimal dan lebih baik lagi dari sebelumnya.

C. Rekomendasi

1. Pada penelitian ini masih dibutuhkan beberapa perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun beberapa rekomendasi yang diajukan dari peneliti yaitu berkaitan dengan penambahan beberapa variabel yang digunakan dalam menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya menyiapkan tambahan referensi mengenai metode ataupun teori-teori yang digunakan dalam menganalisis realitas.
2. Rekomendasi yang diajukan untuk pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah perlu adanya perbaikan dari beberapa indikator penilaian kesiapan seperti kesiapan dari indikator SDM dan Sarana Prasarana, yaitu kesiapan kuantitas atau jumlah sumberdaya manusia dalam optimasi dibidang tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan SAP dibidang keuangan, selain itu harus ada perbaikan dalam kesiapan menciptakan ruang kerja dan lingkungan yang nyaman. Selanjutnya lebih baiknya kesiapan Pemerintah dalam menyiapkan sarana ruangan yang memadai khususnya untuk operasi perangkat SAP harus dioptimalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Algifari, 2010. **Statistika Deskriptif Plus. Yogyakarta**: UPT STIM YKPN

Bastian, 2011. **Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi II**. Jakarta: Salemba Empat

Bodnar, Hopwood. 2004. **Sistem Informasi Akuntansi**. Jakarta barat: PT.Indeks

Ghozali, 2014. **Analisis Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21, Edisi 7**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Herlina, 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010.*

http://www.google.co.id/search?q=herlina+analisis+faktor-faktor&oq.analisis factor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implemetasi pp 71 tahun 2010.

Hakim, 2010. **Statistika Deskriptif**. Yogjakarta: Ekonisia

Mohammad, 2015. *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*

http://www.google.co.id/search?q=mohammad+man+aswan&oq=mohammad+man+aswan. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.pdf

Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2013 Tentang Standart Akuntansi. 2013. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi. 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi. 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014. Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 2014: Perda Kabupaten Trenggalek

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2014. Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 2014: Perda Kabupaten Trenggalek

Pendapat BPK, 2015 *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*

www.pendapat-BPK-November-2015.com

Ririz, 2013. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual " Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember*"

http://www.google.co.id/search?q=riris+setiawati+kusuma&oq=riris+setiawati+kusuma. Akuntansi pemerintah berbasis akrual.pdf

Santoso, Hamdani, 2007. **Statatistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi Dan Niaga**. Jakarta: Erlangga

Sugiono, 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, 2009. **Manajemen Sumberdaya Manusia**. Jakarta: Kencana Perdana Media